

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.1.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (Subri, 2003). Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencapai pekerjaan (Kaufman dan Hotchiss, 1999).

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran sebagai mereka yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum bekerja yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Termasuk didalam kategori ini adalah mereka yang sudah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Menurut Payaman J. Simanjuntak (1985), penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

Ketika terjadi kenaikan jumlah penduduk yang cepat berarti jumlah pekerja kerja akan bertambah banyak, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia masih tetap tidak mengalami perluasan, maka terjadi pengangguran tenaga kerja. Persoalan paling krusial akibat berlimpahnya jumlah penduduk adalah pengangguran. Dalam literatur ekonomi ketenagakerjaan dinyatakan bahwa terjadinya pengangguran akibat adanya ketidak seimbangan angkatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang menginginkan pekerjaan (penawaran tenaga kerja) lebih besar dari pada lowongan tenaga kerja yang tersedia (permintaan tenaga kerja). Orang-orang yang menawarkan tenaganya untuk mencari pekerjaan dan berhasil masuk golongan bekerja sedangkan sisanya yang tidak memperoleh pekerjaan masuk ke dalam golongan penganggur.

Menurut BPS, pengangguran terbuka terdiri atas:

1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan.
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha.
3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan.
4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang sedang bekerja sebelumnya.

Menurut definisi pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja

tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan atau malas untuk bekerja.

Menurut Kaufman dan Hotckiss (1999:657-668) pengangguran akan muncul dalam suatu perekonomian disebabkan oleh tiga hal; proses mencari kerja, kekakuan upah, dan efisiensi terhadap upah.

1. Proses Mencari Kerja

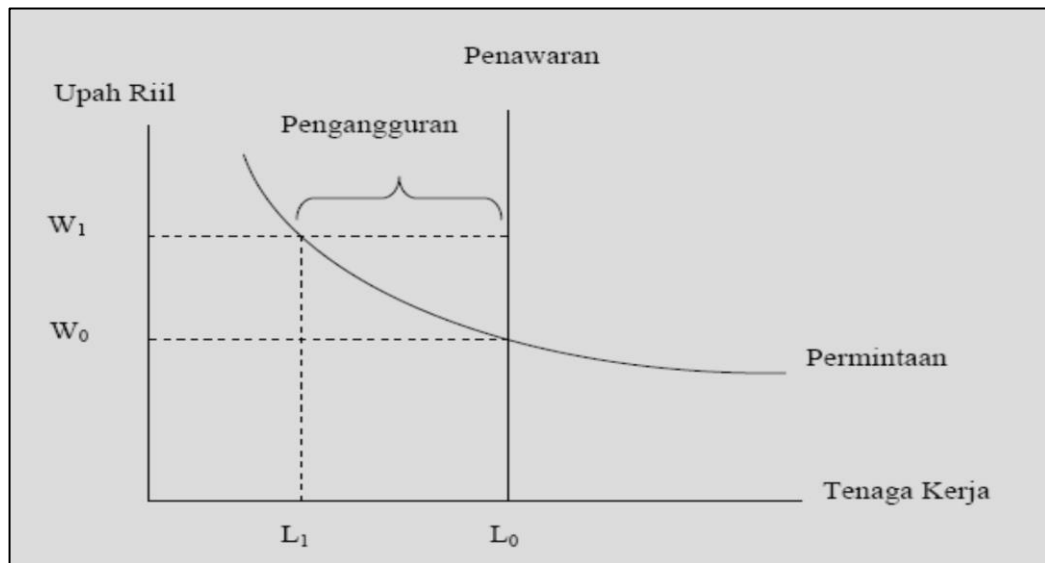
Pada proses ini disediakan penjelasan teoritis yang penting bagi tingkat pengangguran. Munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan adanya para pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain, tidak sempurnanya informasi yang diterima pencari kerja mengenai lapangan pekerjaan yang tersedia, serta informasi yang tidak sempurna pada besarnya tingkat upah yang mereka terima.

2. Efisiensi Upah

Besarnya upah juga dipengaruhi oleh efisiensi pada teori pengupahan. efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah akan semakin keras usaha para pekerja (walaupun akan muncul juga kondisi dimana terjadi *diminishing rate*). Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi lebih tinggi maka justru akan terjadi pengangguran terpaksa akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

3. Kekakuan Upah (*Wage Rigidity*)

Indikasi adanya kekakuan upah (*wage rigidity*) adalah kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Kekakuan upah merupakan salah satu penyebab terjadinya pengangguran (Mankiw 2003). Secara teoritis, untuk mempertahankan tingkat pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*) sama dengan tingkat aktualnya (*actual rate of unemployment*), maka harus dijaga agar tingkat upah riil sama dengan *Marginal Productivity to Labor* (MPL). Upah riil menyesuaikan MPL sehingga ketika MPL turun maka upah riil seharusnya juga turun. Tetapi jika tidak terjadi penurunan, maka upah riil tersebut kaku. Semakin lambat mekanisme penyesuaian maka akan semakin lama dan semakin besar efek guncangan negatif terhadap pengangguran, atau pada saat pertumbuhan upah riil lebih tinggi dari pertumbuhan produktivitas perusahaan maka akan menyebabkan penambahan pengangguran. Di sisi lain, kekakuan upah nominal merupakan kemampuan upah nominal dalam melakukan penyesuaian terhadap harga. Semakin lambat mekanisme penyesuaian maka akan semakin besar penurunan upah riil sebagai respon dari inflasi yang tidak diantisipasi. Dalam model keseimbangan pasar tenaga kerja, upah riil berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Tetapi upah tidak selalu fleksibel, sehingga upah riil tertahan di atas tingkat ekuilibrium sehingga terjadi pengangguran.



Sumber: Mankiw (2003)

Gambar 2.1 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Untuk memahami kekakuan upah dan pengangguran struktural, maka penting untuk memahami mengapa pasar tenaga kerja tidak berada pada tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Gambar 2.1, saat upah riil melebihi tingkat ekuilibrium dan penawaran pekerja melebihi permintaannya, maka perusahaan-perusahaan diharapkan akan menurunkan upah yang akan dibayar kepada para pekerja. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Pengangguran struktural kemudian muncul sebagai implikasi karena perusahaan gagal menurunkan upah akibat kelebihan penawaran tenaga kerja (Mankiw 2003).

Kekakuan upah ini terjadi sebagai akibat dari Undang-Undang No, 13 Tahun 2003 tentang UMR atau kekuatan monopoli serikat pekerja. Berbagai faktor tersebut berpotensi menjadikan upah tertahan di atas tingkat upah keseimbangan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pengangguran. Undang-undang ini menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar

perusahaan kepada para karyawannya. Kebijakan upah minimum ditenggarai akan lebih banyak berdampak pada penganggur dengan usia muda (Mankiw 2003). Alasannya yaitu pekerja dengan usia lebih muda termasuk anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman, maka mereka cenderung memiliki produktivitas marginal yang rendah.

Kekakuan upah nominal juga disebabkan oleh adanya indeksasi upah terhadap inflasi. Pada intinya indeksasi adalah upah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan hidup, dengan kata lain, upah ini telah disesuaikan dengan inflasi. Ketika terjadi inflasi, pekerja akan menuntut kenaikan upah yang memaksa perusahaan untuk meningkatkan upah, karena adanya biaya yang harus ditanggung (*perceived cost*) dari tindakan pekerja jika tuntutan kenaikan upah tidak dikabulkan perusahaan (misalnya; mogok kerja, demonstrasi).

2.1.1.2 Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Teori-Teori Pengangguran yaitu:

1. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004).

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil (Tobar, 2000).

2. Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki

tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pengangguran

1. Berdasarkan Penyebabnya

a. Pengangguran Friksional

Adalah pengangguran yang lebih banyak disebabkan karena sedang proses mencari pekerjaan. Ketika itu pengusaha banyak menawarkan gaji yang tinggi pada pekerja sehingga akhirnya kebanyakan dari pekerja memilih mendapatkan gaji tinggi tersebut dan meninggalkan pekerjaan yang lama untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

b. Pengangguran Siklikal

Adalah pengangguran yang terjadi akibat naik turunnya siklus ekonomi yaitu ada saat permintaan agregat tinggi dan ada saat permintaan turun. Pada saat penurunan permintaan maka akan menyebabkan perusahaan dapat mengurangi permintaan akan tenaga kerja. Sehingga sebagian dari mereka akan terkena PHK. Mereka inilah yang disebut dengan pengangguran siklikal.

c. Pengangguran Struktural

Adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi.

d. Pengangguran Teknologi

Adalah pengangguran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan mesin sehingga manusia tidak lagi dibutuhkan dalam proses produksi. (Sukirno, 2013:328-329)

2. Berdasarkan Cirinya

a. Pengangguran Terbuka

Adalah pengangguran akibat jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya tenaga kerja.

b. Pengangguran Tersembunyi

Adalah pengangguran yang disebabkan kelebihan tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan ekonomi.

c. Pengangguran Bermusim

Adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan musim. Contohnya yaitu pada musim hujan penyadap karet tidak dapat melakukan pekerjaannya sehingga mereka terpaksa menganggur.

d. Setengah Menganggur

Adalah pekerja yang hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu atau satu hingga empat jam sehari. (Sukirno, 2013:330-331)

2.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

2.1.2.1 Pengertian Penduduk

Penduduk diartikan sebagai mereka yang menetap pada suatu wilayah atau daerah setidaknya selama enam bulan atau sekurang-kurangnya dari enam bulan dan bermaksud untuk menetap pada wilayah atau daerah tersebut (BPS,

2009). Untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu daerah atau negara, diperlukan berbagai ukuran seperti angka pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, angka kematian dan angka perpindahan penduduk. Ukuran-ukuran tersebut dapat dihitung dari data yang tersedia pada berbagai sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan yang utama sebagai berikut (Ritonga, 2001):

1. Sensus Penduduk (SP)

Ritonga (2001) mendefinisikan sensus penduduk sebagai “proses keseluruhan dari pada pengumpulan, pengolahan, penelitian, penganalisisan dan penyajian data kependudukan yang menyangkut ciri-ciri kependudukan, sosial ekonomi dan lingkungan hidup”. Ruang lingkup SP ini mencakup seluruh wilayah geografis suatu negara beserta beserta seluruh penduduknya. Terdapat dua tahap pencacahan dalam melakukan sensus yaitu pertama dilakukan dengan *de jure* (membagi responden menurut tempat tinggalnya). Kedua dilakukan dengan *de facto* (membagi responden menurut tempat yang ditemui petugas saat dilakukan sensus).

2. Registrasi Penduduk

Registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Dalam sistem registrasi penduduk, yang dicatat sebagai penduduk adalah “Mereka yang mencatatkan dirinya sebagai penduduk di daerah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)” (Ritonga, 2001).

3. Survei Penduduk

Survei kependudukan dilakukan dengan sistem sampel ataupun dalam bentuk studi kasus yang bertujuan agar informasi yang diperoleh lebih luas dan mendalam. Survei penduduk mempunyai periode tertentu yaitu dilakukan sepuluh tahun sekali atau empat tahun sekali, enam bulan sekali ataupun tiga bulan sekali. Beberapa survei kependudukan yang dilakukan antara lain adalah Survei Penduduk antar Sensus (Supas), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

2.1.2.2 Teori Kependudukan

1. Aliran Malthusian (Thomas Robert Malthus)

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam “Essay on Population”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini di mana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus.

Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah

mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.

2. Aliran Neo-Malthusian (Garreth Hardin & Paul Ehrlich)

Pada abad 20 teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. Kelompok ini menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara “*Preventif Check*” yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Tahun 1960an dan 1970an foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlayar dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas. Pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan tersebut sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapal tersebut. Tahun 1871 Ehrlich menulis buku “*The Population Bomb*” dan kemudian direvisi menjadi “*The Population Explotion*”.

Analisis ini dilengkapi oleh Meadow (1972), melalui buku “*The Limit to Growth*” ia menarik hubungan antara variabel lingkungan (penduduk,

produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam, dan polusi). Tapi walaupun begitu, melapetaka tidak dapat dihindari, hanya manusia cuma menunggunya, dan membatasi pertumbuhannya sambil mengelola alam dengan baik. Kritikan terhadap Meadow umumnya dilakukan oleh sosiolog yang menyindir Meadow karena tidak mencantumkan variabel sosial-budaya dalam penelitiannya. Karena itu Mesarovic dan Pestel (1974) merevisi gagasan Meadow & mencantumkan hubungan lingkungan antar kawasan.

2.1.2.3 Komponen-Komponen Penduduk

1. Fertilitas (Kelahiran)

Sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas mempunyai arti yang sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkupnya. Fertilitas menyangkut peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

2. Mortalitas (Kematian)

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian sangat penting, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya tanda-tanda

kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perancangan pembangunan. Misalnya, perencanaan fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa-jasa untuk kepentingan masyarakat. Data kematian juga diperlukan untuk kepentingan evaluasi terhadap program-program kebijakan penduduk.

3. Migrasi

Migrasi merupakan salah satu faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk. Penilaian migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya densitas (kepadatan) dan distribusi penduduk yang tidak merata. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Migrasi antar bangsa (migrasi internasional) tidak begitu berpengaruh dalam menambah atau mengurangi jumlah penduduk suatu negara kecuali di beberapa negara tertentu yang berkenaan dengan pengungsian, akibat dari bencana baik alam maupun perang. Pada umumnya orang yang datang dan pergi antarnegara boleh dikatakan berimbang saja jumlahnya. Peraturan-peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh banyak negara

umumnya sangat sulit dan ketat bagi seseorang untuk bisa menjadi warga negara atau menetap secara permanen di suatu negara lain.

2.1.3 Upah Minimum

2.1.3.1 Pengertian Upah Minimum

Upah adalah suatu bentuk imbalan yang diterima karyawan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, imbalan tersebut berupa uang berdasarkan atas persetujuan serta dibayarkan sesuai perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan. Upah tersebut meliputi upah pokok maupun tunjangan yang digunakan untuk dirinya sendiri maupun keluarganya (Sumarsono, 2009).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 32 definisi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah minimum adalah upah yang paling rendah untuk setiap jam, setiap hari atau bulan yang dapat diterima oleh setiap tenaga kerja atau buruh (Wirawan, 2015:394). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 89 dijelaskan bahwa upah minimum terdiri dari atas: (a). Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; (b). Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

2.1.3.2 Teori Upah Minimum

1. Teori Upah Berdasar Batas Kebutuhan Hidup Minimum Pekerja

Teori upah berdasar kebutuhan hidup minimum pekerja ini merupakan salah satu teori tertua dalam penetapan upah yang dilontarkan oleh Adam Smith. Teori ini mendasarkan falsafahnya pada pandangan bahwa harga suatu kerja “upah” pada hakekatnya adalah pengeluaran kerja. Oleh karena itu upah harus sama dengan harga kebutuhan-kebutuhan hidup pokok pekerja dan orang yang menjadi tanggung jawabnya yang berupa sandang, pangan, dan papan.

Penetapan upah berkaitan dengan jumlah jiwa yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Pengikut pendapat ini berpandangan bahwa kenaikan tingkat upah akan berpengaruh pada penambahan penduduk. Kelebihan upah di atas kebutuhan barang dan jasa akan berakibat bertambahnya jumlah anggota keluarga pekerja. Efek selanjutnya, penambahan anggota keluarga akan berakibat pada meningkatnya penawaran tenaga kerja sehingga berakibat menurunnya tingkat upah. Penurunan tingkat upah sampai di bawah batas minimal kebutuhan hidup akan berpengaruh pada tingkat kesehatan, gizi, dan pendidikan keluarga pekerja sehingga layanan jasa yang didapat oleh pekerja akan menurun. Dalam kondisi ini, pekerja terdorong untuk mempersedikit jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Akibatnya jumlah anggota keluarga mengecil dan jumlah penawaran tenaga kerja menurun pada masa akan datang. Penurunan penawaran tenaga kerja ini akan berpengaruh pada kenaikan tingkat upah pada masa yang akan datang yang akan

berpengaruh pada perbaikan tingkat kesehatan, gizi dan, pendidikan anggota keluarga serta meningkatnya penawaran tenaga kerja, begitu seterusnya.

Teori ini dibantah karena hanya fokus pada sisi penawaran tenaga kerja saja dan tidak memperhatikan sisi permintaan tenaga kerja. Padahal penetapan tingkat upah terkait dengan beberapa unsur, seperti tingkat permintaan tenaga kerja, keahlian pekerja, kreativitas dan produktivitasnya, perlindungan hukum, dan hak pekerja.

2. Teori Upah Substansi

David Ricardo menciptakan teori upah substansi dengan memanfaatkan teori hukum penawaran dan permintaan. Menurut Ricardo, jika upah pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja akan cenderung melakukan pernikahan karena upahnya cukup untuk menyediakan mas kawin dan pesta perkawinan. Akibatnya tingkat kelahiran meningkat dan selanjutnya berakibat semakin meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja yang mencari lapangan pekerjaan. Kondisi ini akan berlanjut sampai para pencari kerja bersedia diberi upah serendah mungkin ke tingkat substansi. Ketika upah berada di tingkat substansi, para pekerja sedikit melakukan pernikahan dan jumlah kelahiran sedikit yang berakibat menurunnya angkatan kerja. Penurunan angkatan kerja menjadikan upah naik. Demikian terus-menerus upah akan naik dan turun berkisar di atas dan bawah upah substansi.

3. Teori Upah Menurut Pertambahan Produk Marginal

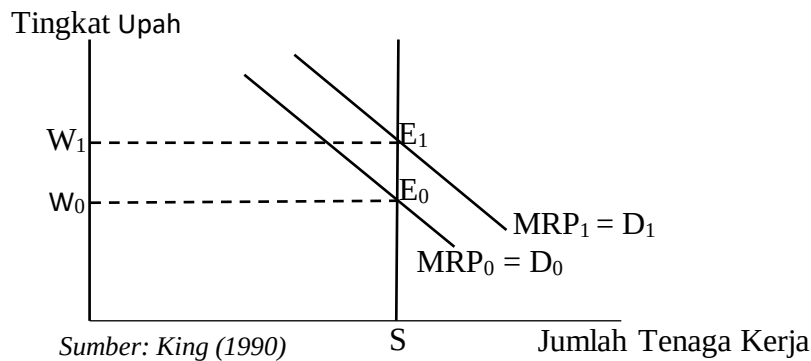
Teori neo klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor

produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Teori produktifitas marginal menyatakan bahwa biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut.

Dari konsep di atas kemudian dikenal istilah *Marginal Product of labour* (MPL), yaitu tambahan output yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat penambahan input sejumlah satu unit. Dalam pandangan klasik, MPL inilah yang dianggap sama dengan upah riil yang diterima oleh tenaga kerja ($MPL = W/P$). Teori ini didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil marginal faktor produksi, di mana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima perusahaan dari karyawan.

Dalam pandangan ilmu ekonomi upah riil sangat tergantung kepada produktifitas dari tenaga kerja. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori permintaan ke atas produksi, sebagaimana grafik berikut:

**Grafik 2.1 Penentuan Upah di
Pasar Tenaga Kerja**



Kurva $MRP_0 = D_0$ dan $MRP_1 = D_1$ menunjukkan hasil penjualan marginal. Kurva MRP menggambarkan kurva permintaan buruh, yang nilainya ditentukan oleh MPP (produksi fisik marginal) dan harga barang. Keadaan kurva MRP_1 berada di atas MRP_0 berarti pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja hasil penjualan marginal yang digambarkan oleh MRP_1 adalah lebih tinggi dari pada hasil penjualan marjinal yang digambarkan oleh MRP_0 . Apabila dimisalkan harga barang di dua keadaan itu adalah sama, kedudukan MRP_1 yang lebih tinggi dari MRP_0 mencerminkan perbedaan produktifitas. Jumlah penawaran tenaga kerja di pasar ditunjukkan oleh kurva S, yang memotong MRP_0 di titik E_0 dan memotong MRP_1 di titik E_1 . Apabila permintaan tenaga kerja adalah $MRP_0 = D_0$, upah tenaga kerja adalah W_0 , sedang permintaan tenaga kerja adalah $MRP_1 = D_1$ maka tingkat upah adalah W_1 .

2.1.3.3 Jenis-Jenis Upah Minimum

Kartasapoetra (1992) menyatakan bahwa jenis-jenis upah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, di mana upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*) sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

2. Upah Hidup

Hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya bagi pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai-nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi. Kemungkinan setelah masyarakat adil dan makmur yang sedang kita perjuangkan dapat terwujud sebaik-baiknya. Upah yang diterima buruh pada umumnya dapat berupa upah hidup, ataupun pula jika perusahaan tempat kerjanya itu dapat berkembang dengan baik, sehingga menjadi perusahaan yang kuat yang akan mampu memberi upah hidup, karena itu pihak buruh sebaiknya berjuang, berpahit-pahit dahulu dengan pihak pengusaha agar perusahaan yang kuat itu dapat terwujud.

Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan perburuhan. Bertitik tolak dari hubungan

formal ini haruslah tidak dilupakan bahwa seorang buruh adalah seorang manusia dan dilihat dari kemanusiaan, sewajarnya kalau butuh itu berhak mendapatkan penghargaan yang wajar dan atau perlindungan yang layak.

3. Upah Wajar

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang relatif ditandai cukup wajar oleh pengusaha dan buruhnya sebagai uang imbalan atau jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan, sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara Upah Minimum dan Upah Hidup yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan buruh dengan keluarganya (di samping mencukupi kebutuhan pokok juga beberapa kebutuhan pangan lainnya, transportasi dan sebagainya).

2.1.4 Inflasi

2.1.4.1 Pengertian Infasi

Menurut Shafrizal (2014:253) Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga karena, misalnya, musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi.

Menurut Winardi (1995) pengertian inflasi adalah suatu kenaikan relatif dalam tingkat harga umum. Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang

deposito dalam peredaran banyak, dibandingkan jumlah barang-barang atau jasa yang ditawarkan atau bila karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional terhadap gejala yang meluas.

Menurut (William N, 2000) Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan terus menerus dalam tingkat harga suatu perekonomian akibat adanya kenaikan permintaan agregat atau penurunan penawaran agregat, atau kenaikan terus menerus dalam rata-rata tingkat harga.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan penyakit ekonomi dimana naiknya harga-harga secara umum dan terus menerus sehingga menyebabkan nilai uang suatu negara menurun.

Inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara menghitung perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan nilai indeks yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga.

Rumus menghitung inflasi:

$$INF_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100$$

Keterangan:

INF_n : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan/tahun) (n)

IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n)

IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen Pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)

2.1.4.2 Teori Inflasi

Menurut Boediono (1990). Secara garis besar ada 3 kelompok teori mengenai inflasi di antaranya:

1. Teori Kuantitas

Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang beredar, dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut :

- a. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (apakah berupa penambahan uang kartal atau penambahan uang giral tidak menjadi soal). Bila jumlah uang beredar tidak ditambah maka inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab musabab awal dari kenaikan harga tersebut.
- b. Laju inflasi ditentukan oleh jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dimasa yang akan datang.

2. Teori Keynes

Menurut teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia.

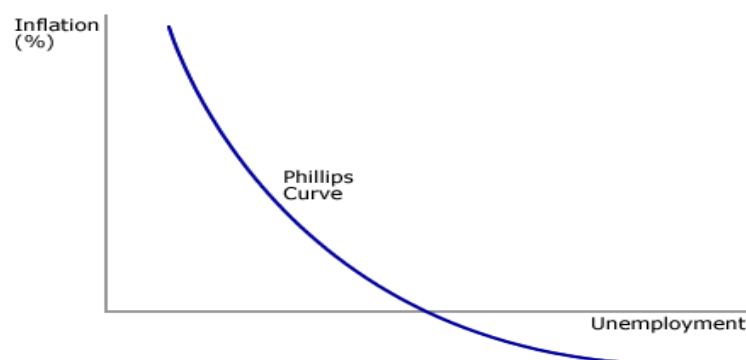
3. Teori Struktural

Adalah teori yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*rigidities*) dari

struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini disebut dengan teori inflasi “jangka panjang”. Dengan kata lain yang dicari disini adalah faktor-faktor jangka panjang yang dapat mengakibatkan inflasi.

4. Teori A.W.Phillips

A.W. Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) tingkat pengangguran akan berkurang.



Sumber: Amri Amir, 2008.

Gambar 2.2 Kurva Phillips

Bentuk kurva Phillips memiliki kemiringan menurun, yang menunjukkan hubungan negatif antara perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran, yaitu saat tingkat upah naik, pengangguran rendah, ataupun sebaliknya. Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi/tingkat pengangguran rendah, sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi.

Dengan kata lain, kurva ini menunjukkan adanya *trade-off* (hubungan negatif) antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu tingkat pengangguran akan selalu dapat diturunkan dengan mendorong kenaikan laju inflasi, dan bahwa laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran (Rizki, 2012). Inflasi dapat dikaitkan secara langsung dengan besarnya pengangguran yang terjadi. Hal ini dapat diketahui pada kaitan antara tingkat inflasi (upah) dengan tingkat pengangguran yang ditunjukkan dengan kurva Phillips. Pada awalnya, kurva Phillips memberikan gambaran kasar mengenai kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat pengangguran dianggap memiliki keterkaitan dengan ketatnya pasar tenaga kerja dan tingginya tingkat pendapatan dan permintaan dari konsumen. Kurva Phillips juga memberikan gagasan mengenai pilihan (*trade off*) antara pengangguran dan inflasi. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi.

Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah (Dernburg, 1994).

Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran menjadi berkurang (Dharmayanti, 2011).

2.1.4.3 Jenis-Jenis Inflasi

1. Menurut Sifatnya

- a. Inflasi merayap/rendah (*creeping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- b. Inflasi menengah (*galloping inflaion*), besarnya antara 10-30% dalam satu tahun.
- c. Inflasi berat (*high inflation*), inflasi yang besarnya 30-100% dalam satu tahun.
- d. Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (berada di atas 100%).

2. Berdasarkan Sebabnya

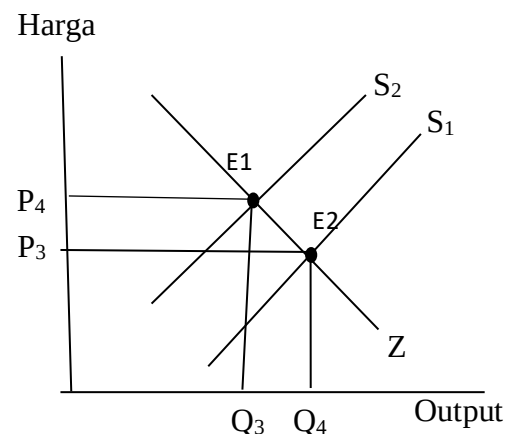
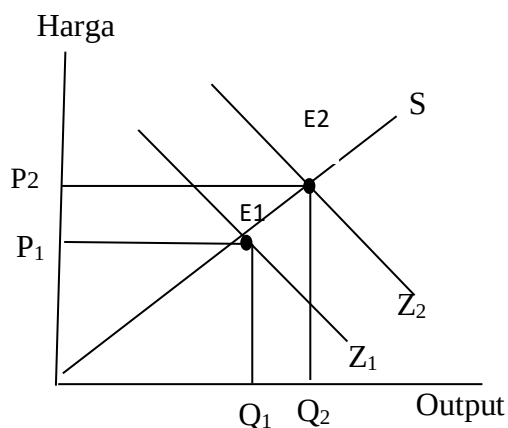
a. Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*)

Inflasi ini timbul sebagai akibat dari pada meningkatnya permintaan agregat. Inflasi ini terjadi karena banyaknya peredaran uang yang berhadapan dengan terbatasnya barang-barang yang dihasilkan dalam keadaan *full employment*. Dan apabila terlalu banyak permintaan atas barang yang terlalu sedikit maka harga akan melonjak tajam.

b. Inflasi desakan biaya (*cost pull inflation*)

Inflasi dorongan biaya atau sering disebut inflasi penawaran atau inflasi karena guncangan penawaran (*supply-shock inflation*), yaitu inflasi yang timbul karena berkurangnya penawaran agregat. Inflasi ini terjadi jika biaya-biaya mendesak harga-harga naik pada periode di mana sumber daya tidak dipergunakan secara penuh.

(A) **Grafik 2.2 Demand Pull Inflation** (B) **Grafik 2.3 Cost Pull Inflation**



Sumber: Boediono, *Ekonomi Makro Edisi 4*

Grafik 2.2 menggambarkan suatu *demand pull inflation*, karena permintaan masyarakat akan barang-barang (*aggregate demand*) bertambah (misalnya kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau

bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah, maka kurva *aggregate demand* akan bergeser dari Z1 ke Z2. Akibatnya, tingkat harga umum naik dari P1 ke P2.

Pada grafik 2.3 bisa dilihat jika biaya produksi naik (misalkan, kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak) maka kurva penawaran masyarakat (*aggregate supply*) bergeser dari S1 ke S2.

Kedua jenis inflasi ini jarang dijumpai dalam praktek dan bentuknya yang murni. Pada umumnya inflasi yang terjadi adalah kombinasi dari kedua jenis inflasi tersebut dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

3. Berdasarkan Asalnya

a. *Domestic Inflation*

Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestik). Kenaikan harga disebabkan karena adanya kejutan (*shock*) dari dalam negeri baik karena perilaku masyarakat maupun perilaku pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan psikologis yang berdampak inflatoar. Kenaikan harga-harga terjadi secara absolut akibatnya terjadilah inflasi atau semakin meningkatnya angka (laju) inflasi.

b. *Import Inflation*

Inflasi yang terjadi dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri. Kenaikan harga dalam negeri terjadi karena kenaikan

harga dari luar negeri terutama barang-barang impor atau kenaikan bahan baku industri yang masih belum dapat diproduksi dalam negeri.

2.1.5 Investasi

2.1.5.1 Pengertian Investasi

Investasi terbagi menjadi dua yaitu investasi asing dan tidak langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aset yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual belikan. Aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual belikan biasanya diperoleh melalui bank komersial. Sedangkan investasi tidak langsung yaitu investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi.

Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal yang dilakukan perusahaan untuk membeli barang ataupun perlengkapan produksi yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa (Sukirno, 2004)

Sedangkan menurut Sjaroni (2010) “investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatannya, yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa”.

Pembentukan modal melalui investasi merupakan faktor yang paling penting dan strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi. Sekali proses ini berjalan tentu ia senantiasa mengumpul dan menghidupi dirinya sendiri. Proses ini berjalan melalui tiga tingkatan. Pertama, kenaikan volume tabungan

akibat meningkatnya kemauan dan kemampuan menabung. Kedua, keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan agar dapat diinvestasikan. Ketiga, penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal pada perusahaan. Pembentukan modal juga berarti pembentukan keahlian karena keahlian sering berkembang sebagai pembentukan modal (Jhingan, 2002).

2.1.5.2 Teori Investasi

1. Teori Neo Klasik

Dalam teori ini menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, *Sollow* dan *Swan* memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010: 88-89).

2. Teori Harrod-Domar

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu

perekonomian untuk menghasilkan barang atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Di sdrrmana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sadono, 2007: 256-257).

2.1.5.3 Jenis-Jenis Investasi

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Pengertian modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. PMA hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 dan yang digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN adalah penggunaan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut ketentuan UndangUndang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Penanaman Modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Penanaman Modal Dalam Negeri Langsung (*Domestic Direct Investment* atau DDI), yaitu penanaman modal oleh pemiliknya sendiri.

- b. Penanaman Modal Dalam Negeri Tidak Langsung (*Domestic Indirect Investment* atau DII), yaitu melalui pembelian obligasi-obligasi, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2.1.5.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

1. Tingkat Pengembalian yang Diharapkan

Keadaan ekonomi pada masa yang akan datang diharapkan memberikan gambaran investasi bagi para investor. Perekonomian yang stabil memberikan jaminan bahwa investasi yang dilakukan akan menghasilkan keuntungan. Meskipun demikian, investor juga harus memperhatikan jenis investasi yang akan menghasilkan keuntungan bagi mereka. Jika suatu investasi akan memberikan harapan keuntungan yang besar, investor akan meningkatkan nilai investasi tersebut.

2. Ketersediaan Faktor Produksi

Besarnya jumlah barang modal yang tersedia menyebabkan rumah tangga perusahaan menunda investasinya. Perusahaan akan memaksimalkan pemanfaatan faktor-faktor produksi seperti modal berupa mesin-mesin produksi. Hal ini dilakukan agar pengeluaran investasi barang modal menjadi lebih efisien.

3. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional yang tinggi akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang tinggi mendorong kenaikan tingkat konsumsi barang dan jasa. Akibatnya perusahaan

mengalami kenaikan laba. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan lagi nilai investasinya.

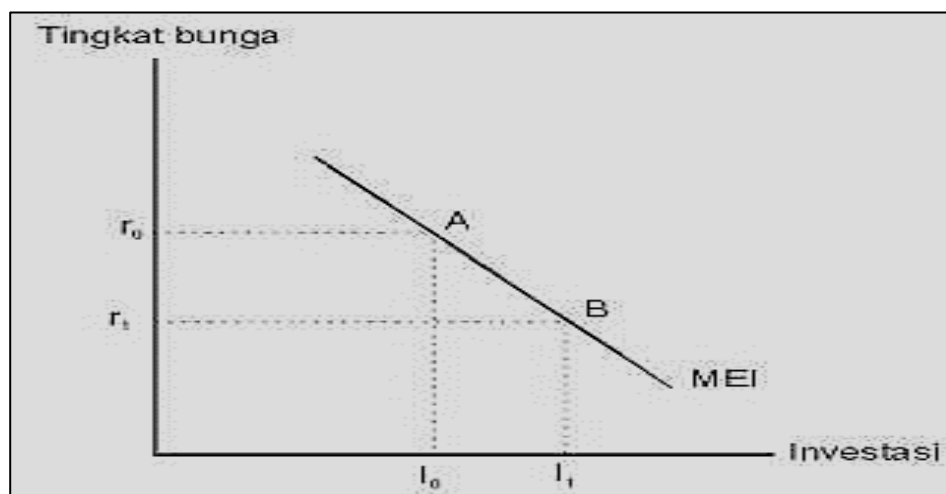
4. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga merupakan faktor penting yang mempengaruhi rumah tangga untuk berinvestasi. Naik turunnya tingkat suku bunga berdampak pada besar kecilnya investasi. Hubungan suku bunga dan investasi adalah berbanding terbalik. Tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan jumlah pendapatan dialokasikan untuk berinvestasi menjadi lebih kecil. Tingkat suku bunga yang paling berpengaruh terhadap investasi adalah suku bunga riil, yaitu suku bunga normal yang dikurangi dengan angka laju inflasi.

Keputusan untuk melakukan investasi berdasarkan pertimbangan jumlah keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan akan diperoleh dari kegiatan investasi karena untuk memperoleh tambahan modal (uang) tidak harus berasal dari pengusaha atau milik sendiri, melainkan dapat melalui pihak lain misalnya, lembaga perbankan atau pasar modal. Dengan sendirinya, motif untuk melakukan investasi tidak hanya sebatas dari adanya tingkat pengembalian yang diharapkan diperoleh di masa depan, tetapi harus memperhitungkan biaya investasinya terutama tingkat suku bunga pinjaman. Semakin rendah biaya (tingkat bunga), semakin banyak orang yang melakukan investasi. Sebaliknya, semakin tinggi biaya bunga semakin sedikit orang yang berani melakukan investasi.

Fungsi investasi menggambarkan hubungan antara tambahan investasi dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Fungsi investasi dapat

digambarkan melalui kurva MEC (*Marginal Efficiency of Capital*). MEC atau efisiensi modal marjinal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*) dari setiap tambahan barang modal. Konsep MEC merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya *General Theory* (1936). Fungsi investasi dipandang sejenis dengan kurva permintaan. Semakin rendah tingkat bunga (biaya investasi), semakin besar tambahan barang modal (investasi). Sebaliknya, semakin tinggi tingkat bunga (biaya peminjaman), semakin kecil tambahan barang modal. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan lebih besar dari tingkat suku bunga, permintaan investasi akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat pengembalian yang diharapkan lebih rendah dari tingkat suku bunga, tingkat investasi akan menurun. Istilah MEC kemudian diganti dengan nama MEI (*Marginal Efficiency of Investment*) karena yang dimaksud bukan jumlah modal, tetapi kenaikan atau tambahan modal. Marginal diartikan sebagai tambahan investasi baru, dan efisiensi berarti dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Dengan menggunakan konsep marginal efisiensi dari investasi tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan berbanding terbalik (korelasi negatif) antara tingkat suku bunga dan jumlah investasi (permintaan investasi) yang akan dilakukan pada suatu periode tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar 2.3 di halaman berikut.



Sumber: Boediono, *Ekonomi Moneter Edisi 3*.

Gambar 2.3 Efisiensi Modal Marjinal

Dapat dilihat dari gambar 2.3 Titik A menggambarkan pada suku bunga r_0 sebanyak I_0 investasi akan dilakukan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada waktu yang sama, nilai investasi untuk melaksanakan suatu proyek memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return*) setidaknya tidaknya sama dan melebihi r_0 adalah I_0 . Pada titik B menunjukkan bahwa pengurangan suku bunga dari r_0 menjadi r_1 menyebabkan investasi perusahaan dalam perekonomian meningkat dari I_0 menjadi I_1 . Hal tersebut menunjukkan bahwa pada waktu yang sama, nilai investasi untuk melaksanakan suatu proyek yang memberikan tingkat pengembalian diharapkan (*expected return*) setidaknya tidaknya sama dan melebihi r_1 adalah I_1 .

MEC dan MEI adalah dua konsep yang sama-sama menggambarkan tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected of return*) dari setiap tambahan barang modal (investasi). Jika tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga, pengusaha akan

meminjam uang dari perbankan atau pasar modal untuk melakukan investasi. Sebaliknya, jika tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku, pengusaha tidak akan meminjam uang dari bank dan tidak akan melakukan investasi, mungkin akan lebih memilih menyimpan uangnya di bank.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai pengangguran terbuka sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian Ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Muhammad Burhanudin/2015/Pengaruh Produk Domestik Bruto, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Periode 2008-2013	Variabel Independen: Upah Minimum	Variabel Independen: Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia	Produk Domestik Bruto berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten, Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Banten, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Banten.

Lanjutan Tabel 2.2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Artriyani Syahnur Tirta/2013/Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah	Inflasi, Investasi	Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap Pengangguran, dan Investasi mempunyai pengaruh negatif terhadap Pengangguran di Jawa Tengah tahun 2008-2010.
3	Fatmi Ratna Ningsih/2010/Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia periode 1998-2008	Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi	Tidak terdapat pengaruh Inflasi dengan Pengangguran di Indonesia periode 1998-2008 dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia periode 1998-2008.
4	Dewi Kartika Sari/2017/Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kota, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk dan Beban/Tanggungan Penduduk terhadap	Upah Minimum, Jumlah Penduduk	Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Beban atau Tanggungan Penduduk	PDRB Provinsi Jawa Timur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pengangguran Terbuka, UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM.

Lanjutan Tabel 2.2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tingkat Pengangguran Terbuka di kota-kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015			berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran, dan Beban/Tanggungan Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Kota-Kota Provinsi Jawa Timur.
5	Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagiyo/2014/Efek Peningkatan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran	Upah Minimum, Jumlah Penduduk, Inflasi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Upah Minimum dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran, PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran, sedangkan Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran
6	Norman Luther Aruan, D. Sriyono/2014/Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Upah Minimum, Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi, Krisis Ekonomi di Indonesia tahun 1998	Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan periode krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat

Lanjutan Tabel 2.2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tahun 1085-2011			pengangguran Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7	Muhammad Shun Hajji, Nugroho SBM/2013/Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, Dan Angka Melek Huruf terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011	Inflasi, Upah Minimum	PDRB, Angka Melek Huruf	Upah Minimum dan Angka Melek Huruf berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran. Kemudian PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan, dan Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.
8	Nur Ravika Famala Sari/2016/Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Pengangguran Di Jawa Timur Tahun 2010-2014	Upah Minimum, PMDN	PDRB, Pengeluaran Pemerintah, PMA	Secara Parsial: variabel PDRB, Upah Minimum, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Di Jawa Timur, sedangkan PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Di Jawa Timur.

Lanjutan Tabel 2.2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	M. Wardiansyah, Yulmardi, Zainul Bahri/2016/Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus provinsi-provinsi se-Sumatera)	Upah Minimum	Pertumbuhan Ekonomi	Upah Minimum dan Perumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.
10	Herniwati Retno Handayani, Dian Priastiwi/2019/Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Penduduk, Upah Minimum	Pendidikan, PDRB	Jumlah Penduduk memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran, sementara Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran. Secara Simultan: Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran.
11	Nila Ayu Islamia/2017/Analisis Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Pulau Jawa Tahun 2008-2017	Upah minimum, Jumlah Penduduk, Investasi	Pertumbuhan Ekonomi	Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan, sedangkan Investasi dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengangguran Terdidik lulusan universitas di Pulau Jawa.

Lanjutan Tabel 2.2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Rosyda Nur Fauziah/2018/Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2010-2015	Inflasi, Upah Minimum, PMDN	Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan, sedangkan PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa.
13	Andria Zulfa/2016/Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe	Pertumbuhan Penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan.
14	Ni Wayan Mentari dan I Nyoman Mahendra Yasa/2016/Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah terhadap Tingkat Pengangguran melalui jumlah Investasi di Provinsi Bali	Upah, Investasi	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif, sedangkan tingkat upah dan Jumlah Investasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hubungan laju pertumbuhan penduduk yang dialami Indonesia mengakibatkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Akan tetapi, kenaikan jumlah angkatan kerja tersebut, tidak dibarengi oleh meningkatnya kesempatan kerja, akibatnya angkatan kerja yang jumlahnya bertambah tersebut, tidak dapat didistribusikan ke lapangan kerja. Hal ini akan berdampak pada jumlah pengangguran yang terus bertambah, berdasarkan penjelasan ahli-ahli ekonomi klasik, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan kaitan diantara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum (*optimum population theory*), teori ini menjelaskan apabila kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita, akibatnya pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Disisi lain, apabila penduduk sudah terlalu banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya, hal ini berdampak secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran.

Malthus berpendapat tentang hubungan antara populasi, upah riil, dan inflasi. Ketika populasi buruh tumbuh lebih cepat dari pada produksi makanan, maka upah riil turun, karena pertumbuhan penduduk menyebabkan biaya hidup yaitu biaya makanan naik. Ketika upah riil disuatu wilayah tinggi, maka akan

mempengaruhi pengangguran. Ketika terjadi peningkatan upah riil maka suatu perusahaan akan mengurangi jumlah buruhnya, sementara penawaran tenaga kerja yang ada masih tetap tinggi. Ketika penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari pada permintaan tenaga kerja maka akan terjadi pengangguran, artinya Malthus beranggapan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengangguran dengan jumlah penduduk, berbeda dengan pendapat Emili Durkheim, ia beranggapan bahwa pengangguran dan jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif, ketika jumlah penduduk meningkat maka akan ada persaingan setiap orang untuk lebih meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya.

2.3.2 Hubungan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi Klasik dalam suatu perekonomian modern akan dapat dilihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Hal tersebut membuat pengangguran menjadi lebih sulit untuk dihapuskan (Sukirno, 2013:84). Dalam suatu kurva Phillips yang menerangkan antara hubungan kenaikan upah dan pengangguran, dan hubungan tingkat inflasi dan pengangguran. Kesimpulan dari kurva tersebut adalah terdapat satu hubungan yang negatif diantara kenaikan tingkat upah dengan pengangguran. Ketika tingkat pengangguran tinggi maka tingkat upah rendah dan sebaliknya jika pengangguran rendah maka tingkat upah tinggi (Sukirno, 2013:245-246).

Kurva Phillips diperoleh semata-mata atas dasar studi empirik, tidak ada dasar teorinya (Nopirin, 2000: 37). Perkembangan selanjutnya dari studi empiris ini, Lipsey (1960) mencoba untuk mengisi dasar teorinya dengan menggunakan

teori pasar tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja, tingkat upah cenderung turun apabila terdapat kelebihan penawaran tenaga kerja (pengangguran) dan akan naik apabila terdapat kelebihan permintaan tenaga kerja. Pengangguran mempunyai hubungan negatif dengan kelebihan permintaan akan tenaga kerja. Dengan demikian, apabila dalam pasar terdapat kelebihan penawaran, ini akan tercermin pada banyaknya orang yang mencari pekerjaan. Namun ia mengakui adanya kenyataan bahwa pasar tenaga kerja tidak sempurna sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya pengangguran friksional atau pengangguran alamiah (Nopirin, 2000:37).

2.3.3 Hubungan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap tingkat pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi.

Dari kajian A.W. Phillips menggambarkan mengenai hubungan inflasi dengan pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (harga) maka untuk memenuhi permintaan tersebut

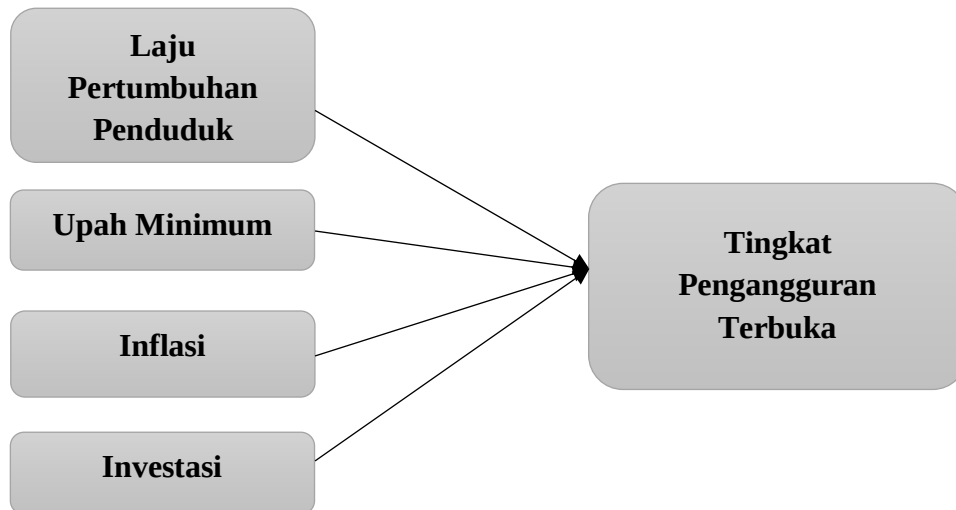
produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja tersebut, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) tingkat pengangguran menjadi berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran adalah negatif.

2.3.4 Hubungan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hubungan antara investasi dengan pengangguran dapat dilihat berdasarkan teori Harrod Domar. Harrod Domar berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya, semakin besar kapasitas produksi akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula, dengan asumsi "*full employment*". Ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, yang mana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan begitu, perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat pula dan tingkat pengangguran akan menurun. Maka hubungan investasi dengan tingkat pengangguran yaitu negatif.

Berdasarkan studi pustaka yang telah dikemukakan, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di antaranya laju pertumbuhan penduduk, upah minimum, inflasi, dan investasi. Untuk membantu mempermudah dalam pembacaan

kerangka pemikiran teoritis secara skema kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4

Model Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji setelah peneliti mendalami permasalahan penelitiannya dengan saksama serta menetapkan anggapan dasar (Arikunto, 2006).

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang akan dilakukan dalam penelitian ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif, sedangkan upah minimum, inflasi, dan investasi berpengaruh negatif

terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat tahun 2006-2017.

2. Diduga secara bersama-sama laju pertumbuhan penduduk, upah minimum, inflasi, dan investasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat tahun 2006-2017.